

SPM	
2024	
PERBUB KAB.NGANJUK NO.12, BD 2024/NO.12, 13 HLM	
PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN NGANJUK	
ABSTRAK	- Melaksanakan ketentuan Pasal 2 1 ayat (21) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 ter.tang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Nganjuk,.
	- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PKTI/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022.
	- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Nganjuk yang meliputi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data, integrasi SPM, Strategi penerapan SPM, pemantauan dan evaluasi, serta pendanaan.
CATATAN	: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 04 Juni 2024; - Jumlah halaman penjelasan 11 halaman dan lampiran 2 halaman.